



RENJA PERUBAHAN

(RENCANA KERJA PERUBAHAN)

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA PASURUAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

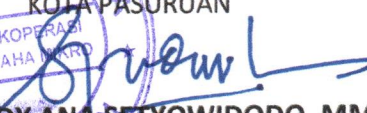
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja perubahan tahun 2022 ini disusun dalam upaya memberikan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama tahun 2022.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2022, disusun dengan maksud sebagai referensi dan acuan dalam menterjemahkan Misi guna menuju Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk :

“MEWUJUDKAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO NAIK KELAS DALAM MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN KETAHANAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL”

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2022.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasuruan, 25 Juli 2022
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA PASURUAN
DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

Drs. H. EDY ANA SETYOWIDODO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640505 199303 1 012

SISTEMATIKA PENULISAN

	Hal.	
Keputusan Walikota		
Keputusan Kepala SKPD		
Kata Pengantar	I	
Daftar isi	II	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	3
1.3	Maksud dan Tujuan.....	4
1.4	Sitematika Penulisan.....	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBUNAN II TAHUN 2022	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Tribulan II Tahun2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	10
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	11
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB IV	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan (Renja Perubahan Koperasi dan Usaha Mikro) tahun 2022 merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan koperasi dan usaha mikro, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Isi Renja adalah menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada satu tahun ke depan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun dua (akhir tahun) rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026. Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Misi Walikota terpilih pada tahun 2021. Selanjutnya dari rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026 setiap tahun disusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja, Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan

daerah, penjelasan mengenai tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra).

Analisis renstra K/L dan SKPD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra SKPD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya. Mengacu pada Tema dan Prioritas RKPD 2022 Kota pasuruan yaitu , dengan 9 Prioritas yaitu;

1. Membangun Sistem Perizinan yang Berorientasi Pada Kemudahan Berusaha dan Investasi;
2. Menciptakan Daya Tarik Kunjungan Wisata dengan Wisata Religi, Heritage, dan Event Kreatif dengan Komunitas Lokal;
- 3. Membangun Sentra UMKM dan Industri Olahan untuk Membuka Lapangan Kerja;**
4. Penataan Kawasan Permukiman yang Terhubung dengan Aspek Perekonomian dan Layanan Dasar;
5. Memastikan Semua Lapisan Masyarakat Mudah dalam Mengakses Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan dari Covid 19
6. Menguatkan Modal Sosial yang Berkarakter dan Harmonisasi Antar Umat Beragama dan Etnis;
7. Menata Ruang Publik Hijau dan Nyaman yang Ramah Anak, Lansia, dan Difabel;
8. Menciptakan Budaya Kerja Birokrasi yang Adaptif, Lincah, dan Bersih;
9. Mendekatkan Layanan Kepada Masyarakat dengan Digitalisasi Layanan

Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal kedepan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan mendukung prioritas pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ke 3 yaitu Membangun Sentra UMKM dan Industri Olahan untuk Membuka Lapangan Kerja. Guna mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan telah menetapkan kebijakan yang akan ditempuh dalam satu tahun mendatang, yaitu :

1. Peningkatan kualitas, kuantitas usaha koperasi.
2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku Koperasi dan UMKM.
3. Digitalisasi dalam hal pengelolaan usaha dan pemasaran hasil usaha Koperasi dan UMKM.
4. Penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM.

Keterkaitan Renja Perangkat Perubahan Daerah dengan dokumen P-RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPP, RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2015 LNRI Tahun 2004 Nomor 104;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, LNRI Tahun 2004 Nomor 126;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LNRI Tahun 2014 Nomor 244;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LNRI Tahun 2003 Nomor 4286;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, LNRI Tahun 2008 Nomor 21;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, dan RKPD, Berita Negara RI Tahun 2017 nomor 1312;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021, Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1;
8. Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah :

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program/Kegiatan selama 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Tersedianya acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.
2. Untuk perencanaan pengembangan, penumbuhan dan peningkatan dibidang koperasi dan usaha mikro melalui arah kebijakan, strategi serta sasaran – sasaran dan program yang ingin dicapai selama 1 tahun serta untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Keputusan Walikota

Keputusan Kepala Dinas koperasi dan Usaha Mikro

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Sampai Tribulan II
Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Program/ kegiatan pada tahun anggaran 2021 yang pelaksanaannya didukung oleh 7 program, 14 kegiatan, dan 32 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar: Rp. 5.810.119.277,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh *rupiah*) dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.000.060.028,00 (*Dua Milyar Enam Puluh Ribu Dua Puluh Delapan rupiah*) atau sebesar 34,4 persen sampai Tribulan II. Adapun indikator kinerja yang dihasilkan dari urusan **Bidang Koperasi dan Usaha Mikro** yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan dengan anggaran Rp 25.024.700,- dengan realisasi Rp. 0,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran Rp.9.749.300,- dengan realisasi Rp. 0,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran Rp.404.200.000,- dengan realisasi Rp. 99.469.400 ,- dengan serapan anggaran 24,6 %
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran Rp.370.499.300,- dengan realisasi Rp. 37.550.900,- dengan serapan anggaran 10 %
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran Rp.349.396.980,- dengan realisasi Rp. 0 ,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Pengembangan UMKM dengan anggaran Rp.912.975.320,- dengan realisasi Rp. 146.454.050,- dengan serapan 16 %

Demikian Review evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai Tribulan II Tahun 2022 dapat di capai kurang baik dengan capaian **34,4 %** sampai pada Tribulan II, Mendukung Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran program kegiatan yang lebih matang berdasar evaluasi tahun sebelumnya perlu di ambil kebijakan lanjutan dalam memaksimalkan target program kegiatan pelaksanaan.

Evaluasi Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan berdasarkan program dan kegiatan pada Tahun 2020 secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja kegiatan yang penilaiannya berorientasi pada input output, Hasil evaluasi capaian RENJA SKPD sampai dengan tribulan II, dari 7 indikator program yang ada hanya terealisasi pada program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Gaji dan tunjangan ASN (**tabel 2.1**)

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Disajikan (**tabel 2.2**)

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD

Kajian Pencapaian kinerja pelayanan Dinas koperasi dan Usaha Mikro tersusun dalam tabel berikut

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021
Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prosentase Pertumbuhan omset/volume usaha											Indikator 2021
2	Prosentase peningkatan usaha mikro yang berkembang											Indikator 2021
3	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif											Indikator 2020
4	Prosentase Pertumbuhan Usaha Mikro ke Usaha Kecil											Indikator 2020

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan dan hambatan

1. Masih lemahnya pemahaman anggota koperasi dalam pengembangan modal koperasi sebagai milik bersama, hal ini terbukti dengan banyaknya kredit macet pada Koperasi
2. Usaha yang dikelola koperasi mayoritas usahanya simpan pinjam tanpa memiliki usaha lainnya
3. Sumber Daya Manusia pelaku koperasi itu sendiri rendah
4. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten
5. Terbatasnya daya saing produk Usaha Mikro dan jangkauan pemasaran
6. Kurangnya Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan
7. Belum tersedianya sistem Sistem Aplikasi pengelolaan data dan informasi Usaha Mikro Kecil informasi dan Data base Usaha Mikro yang akurat.
8. Kurangnya keperpihakan terhadap Mitra Usaha yang tidak dapat menjamin pemasaran produk dan Standar kualitas yang dituntut berbeda dengan pasar lokal/tradisional.
9. Terhambatnya kegiatan – kegiatan kemasyarakatan dikarenakan situasi dan kondisi pandemi covid 19.

Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- a. Meningkatkan pemahaman anggota koperasi dalam pengembangan modal koperasi sebagai milik bersama
- b. adanya peningkatan dan pengembangan jaringan usaha lainnya
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia pelaku koperasi itu sendiri
- d. Menambahkan jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten
- e. Peningkatan daya saing produk Usaha Mikro dan jangkauan pemasaran
- f. Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan
- g. Penguatan data Usaha Mikro yang sistematis berbasis Sistem Aplikasi pengelolaan data dan informasi Usaha Mikro Kecil

	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi lembaga kerjasamanya	115	Koperasi	35,000,000	Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi lembaga kerjasamanya	115	Koperasi	35,000,000
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Prosentase koperasi dengan kriteria sehat	58.40	%	15,000,000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Prosentase koperasi dengan kriteria sehat	58.40	%	15,000,000
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	71	koperasi	15,000,000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	71	koperasi	15,000,000
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	80	Koperasi	15,000,000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	80	Koperasi	15,000,000
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Prosentase pengurus koperasi yang meningkat omset/volume usaha	32.88	%	664,999,400	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Prosentase pengurus koperasi yang meningkat omset/volume usaha	32.88	%	664,999,400
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	71	Koperasi	664,999,400	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	71	Koperasi	664,999,400
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Pasuruan	Pembinaan Bagi Koperasi Siswa/Sekolah	50	Pengelola Koperasi Siswa/Sekolah	25,000,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Pasuruan	Pembinaan Bagi Koperasi Siswa/Sekolah	50	Pengelola Koperasi Siswa/Sekolah	25,000,000
		Kota Pasuruan	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi	60	Pengelola Koperasi	40,000,000		Kota Pasuruan	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi	60	Pengelola Koperasi	40,000,000
		Kota Pasuruan	Pembinaan Bimtek Akuntansi ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)	60	Pengelola Koperasi	40,000,000		Kota Pasuruan	Pembinaan Bimtek Akuntansi ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)	60	Pengelola Koperasi	40,000,000
		Kota Pasuruan	Bimtek Koperasi Usaha Ritel	50	Pengelola Koperasi	30,000,000		Kota Pasuruan	Bimtek Koperasi Usaha Ritel	50	Pengelola Koperasi	30,000,000
		Luar Kota Pasuruan	Pembinaan Capacity Building Bagi Pengelola Koperasi Wanita	40	Pengelola Koperasi Wanita	60,000,000		Luar Kota Pasuruan	Pembinaan Capacity Building Bagi Pengelola Koperasi Wanita	40	Pengelola Koperasi Wanita	60,000,000
		Kota Pasuruan	Pembinaan Koperasi KSP/USP	60	Pengelola Koperasi	40,000,000		Kota Pasuruan	Pembinaan Koperasi KSP/USP	60	Pengelola Koperasi	40,000,000
		Kota Pasuruan	Sosialisasi Pendirian Lembaga Koperasi	10	Pengelola Koperasi	35,000,000		Kota Pasuruan	Sosialisasi Pendirian Lembaga Koperasi	10	Pengelola Koperasi	35,000,000
		Kota Pasuruan	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK NON FISIK)	240	Koperasi dan UKM	460,000,000		Kota Pasuruan	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK NON FISIK)	240	Koperasi dan UKM	460,000,000
		Luar Kota Pasuruan	lomba Jambore Pemuda Koperasi Siswa	20	Pengelola Koperasi	7,000,000		Luar Kota Pasuruan	lomba Jambore Pemuda Koperasi Siswa	20	Pengelola Koperasi	7,000,000
		Luar Kota Pasuruan	lomba Peringatan Hari Koperasi	20	Pengelola Koperasi	10,000,000		Luar Kota Pasuruan	lomba Peringatan Hari Koperasi	20	Pengelola Koperasi	10,000,000
		Kota Pasuruan	Manajemen Bisnis Koperasi	60	Pengelola Koperasi	30,000,000		Kota Pasuruan	Manajemen Bisnis Koperasi	60	Pengelola Koperasi	30,000,000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang berkembang	6.50	%	570,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang berkembang	6.50	%	570,000,000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	71	koperasi	570,000,000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	71	koperasi	570,000,000
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Dana Hibah yang diberikan Kepada Dekopinda	1	Dekopinda	100,000,000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Dana Hibah yang diberikan Kepada Dekopinda	1	Dekopinda	100,000,000
		Luar Kota Pasuruan	Kegiatan Peringatan Hari Koperasi	20	Pengelola Koperasi	15,000,000		Luar Kota Pasuruan	Kegiatan Peringatan Hari Koperasi	20	Pengelola Koperasi	15,000,000
		Luar Kota Pasuruan	Strategi Komunikasi Online Pemasaran Produk dan Jasa Koperasi	40	Pengelola Koperasi	55,000,000		Luar Kota Pasuruan	Strategi Komunikasi Online Pemasaran Produk dan Jasa Koperasi	40	Pengelola Koperasi	55,000,000
		Luar Kota Pasuruan	Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi	20	Pengelola Koperasi	75,000,000		Luar Kota Pasuruan	Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi	20	Pengelola Koperasi	75,000,000
		Luar Kota Pasuruan	Pameran Perkoperasian	2	Pengelola Koperasi	325,000,000		Luar Kota Pasuruan	Pameran Perkoperasian	2	Pengelola Koperasi	325,000,000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Prosentase usaha mikro yang berkualitas	5.2	%	365,057,940	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Prosentase usaha mikro yang berkualitas	5.2	%	365,057,940

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah usaha mikro yang terdapat	6000	data	365,057,940	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah usaha mikro yang terdapat	6000	data	365,057,940
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Pasuruan	Jumlah Usaha Mikro Kota Pasuruan yang Update / Terdapat	4	Kecamatan	44,999,440	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Pasuruan	Jumlah Usaha Mikro Kota Pasuruan yang Update / Terdapat	4	Kecamatan	44,999,440
	Kota Pasuruan	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data UMKM Kota Pasuruan (SIDUTA)	1	Aplikasi	50,000,000		Kota Pasuruan	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data UMKM Kota Pasuruan (SIDUTA)	1	Aplikasi	50,000,000
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Luar Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Usaha Mikro yang melakukan Jaringan Kemitraan (usaha mikro)	10	Usaha Mikro	0	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Luar Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Usaha Mikro yang melakukan Jaringan Kemitraan (usaha mikro)	10	Usaha Mikro	0
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang dibina Manajemen Pembiayaan dan Permodalan Usaha Mikro	60	Usaha Mikro	97,000,000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang dibina Manajemen Pembiayaan dan Permodalan Usaha Mikro	60	Usaha Mikro	97,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor PLUT - KUMKM	129	Unit	173,058,500	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor PLUT - KUMKM	129	Unit	173,058,500
	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Peresmian Gedung PLUT	150	orang			Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Peresmian Gedung PLUT	150	orang	
	Kota Pasuruan	Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan	5	Orang			Kota Pasuruan	Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan	5	Orang	
	Kota Pasuruan	Jumlah Alat Tulis Kantor	20	Jenis			Kota Pasuruan	Jumlah Alat Tulis Kantor	20	Jenis	
	Kota Pasuruan	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12	Bulan			Kota Pasuruan	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	12	Bulan	
	Kota Pasuruan	Luas Gedung dan Bangunan PLUT yang dipelihara	2320	M2			Kota Pasuruan	Luas Gedung dan Bangunan PLUT yang dipelihara	2320	M2	
	Kota Pasuruan	Jumlah Kebutuhan dan Bahan Pembersih Kantor yang tersedia	14	Jenis			Kota Pasuruan	Jumlah Kebutuhan dan Bahan Pembersih Kantor yang tersedia	14	Jenis	
	Kota Pasuruan	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan pembuatan rajut khas pasuruan	50	Usaha Mikro			Kota Pasuruan	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan pembuatan rajut khas pasuruan	50	Usaha Mikro	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase usaha mikro yang berkembang	3.3	%	474,999,138	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase usaha mikro yang berkembang	3.3	%	474,999,138	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prosentase usaha mikro yang dibina	5.6	%	474,999,138	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prosentase usaha mikro yang dibina	5.6	%	474,999,138	
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Luar Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi Pameran Produk Usaha Mikro (Luar Provinsi)	3	Pelaku UMK	270,000,000	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Luar Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi Pameran Produk Usaha Mikro (Luar Provinsi)	3	Pelaku UMK	270,000,000
	Luar Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi Pameran Produk Usaha Mikro (Dalam Provinsi)	3	Pelaku UMK	160,000,000		Luar Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi Pameran Produk Usaha Mikro (Dalam Provinsi)	3	Pelaku UMK	160,000,000
	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi Pameran Produk Usaha Mikro (Dalam Kota)	10	Pelaku UMK	80,000,000		Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi Pameran Produk Usaha Mikro (Dalam Kota)	10	Pelaku UMK	80,000,000
	Kota Pasuruan	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pembinaan Pengembangan Usaha Mikro	60	Usaha Mikro	23,000,000		Kota Pasuruan	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pembinaan Pengembangan Usaha Mikro	60	Usaha Mikro	23,000,000
	Kota Pasuruan	Jumlah Petugas Pengumpul Data Usaha Mikro	1	Orang	12,000,000		Kota Pasuruan	Jumlah Petugas Pengumpul Data Usaha Mikro	1	Orang	12,000,000
	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Kewirausahaan	70	Usaha Mikro	60,000,000		Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Kewirausahaan	70	Usaha Mikro	60,000,000
	Kota Pasuruan	Monitoring dan Evaluasi pelaku Usaha Mikro	180	Usaha Mikro	60,000,000		Kota Pasuruan	Monitoring dan Evaluasi pelaku Usaha Mikro	180	Usaha Mikro	60,000,000